

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya memperbesar volume sampah yang dihasilkan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mampu menampung, tetapi juga mengolah sampah secara berkelanjutan.

Pertumbuhan urbanisasi yang semakin pesat diiringi dengan perubahan struktur ekonomi, turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat perkotaan. Pergeseran pola konsumsi tersebut berimplikasi langsung terhadap jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah material sisa dari aktivitas manusia sehari-hari maupun hasil proses alam yang memiliki bentuk fisik padat. Secara umum, peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan akan sejalan dengan meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasilkan. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu strategis dalam pembangunan kota modern yang perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang terencana dengan baik (SEN, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi peningkatan signifikan dalam produksi sampah setiap

tahunnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume sampah nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total timbulan sampah tercatat sebesar 19.020.928 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 13.748.021 ton. Selanjutnya, pada tahun 2022 angka timbulan sampah kembali meningkat menjadi 18.630.383 ton, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 23.878.638 ton. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana total timbulan sampah nasional mencapai 36.009.662 ton. Data tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan timbulan sampah dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode tertentu. Rincian lengkap mengenai timbulan sampah nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Timbulan Sampah Nasional Pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Sampah (Ton/Tahun)
2020	19.020.928
2021	13.748.021
2022	18.630.383
2023	23.878.638
2024	36.009.662

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, secara keseluruhan volume sampah

yang dihasilkan masih tergolong tinggi dan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sumber utama timbulan sampah di Indonesia masih didominasi oleh rumah tangga dengan kontribusi sebesar 55,45%. Setelah itu disusul oleh sektor pasar sebesar 14,9%, aktivitas perniagaan sebesar 10,27%, kawasan pemukiman sebesar 9,99%, perkantoran sebesar 4,09%, fasilitas publik sebesar 3,87%, serta sumber lainnya yang berkontribusi sebesar 1,43% pada tahun 2024.

Meskipun sistem pengelolaan sampah terus mengalami perkembangan, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini tercermin dari belum efektifnya upaya pengendalian sampah di sejumlah daerah, khususnya di kawasan perkotaan besar yang menghadapi kompleksitas persoalan lingkungan akibat tingginya timbulan sampah.

Tabel 1. 2 Daftar Kabupaten/Kota Penghasil Timbulan Sampah Tertinggi di Indonesia Tahun 2024

No.	Kota	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)
1.	Kabupaten Bogor	1.026.931
2.	Jakarta Timur	859.045
3.	Kota Tangerang	798.405
4.	Jakarta Barat	757.857
5.	Jakarta Selatan	725.690
6.	Kota Surabaya	659.033

7.	Kota Medan	632.149
8.	Kabupaten Bekasi	614.462
9.	Kota Bandung	546.151
10.	Jakarta Utara	509.694
11.	Kabupaten Bandung	478.956
12.	Kabupaten Cirebon	465.242
13.	Kabupaten Cianjur	462.637
14.	Kota Serang	438.206
15.	Kota Semarang	434.243
16.	Kabupaten Garut	418.262

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, Kota Semarang tercatat sebagai salah satu dari 16 kabupaten/kota dengan timbulan sampah tertinggi di Indonesia, dengan total produksi sampah mencapai 434.243 ton per tahun. Data tersebut menempatkan Kota Semarang pada peringkat ke-15 secara nasional, berada di bawah kota-kota besar seperti Kota Medan (632.149 ton) dan Kota Surabaya (659.033 ton), namun tetap menunjukkan volume timbulan sampah yang substansial dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tingginya timbulan sampah di Kota Semarang mencerminkan tekanan pertumbuhan penduduk dan aktivitas urban yang terus meningkat. Keberadaan Kota Semarang dalam daftar tersebut mengindikasikan bahwa persoalan pengelolaan sampah di kota ini bukan sekadar isu lokal, melainkan telah menjadi perhatian dalam skala nasional. Kondisi ini memperkuat

urgensi dilakukannya kajian mendalam terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang, mengingat kompleksitas persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan derajat kesehatan masyarakat di setiap wilayah administrasinya.

Melalui tabel 1.2, dapat diketahui bahwa Kota Semarang termasuk dalam kelompok kota dengan tingkat produksi sampah yang relatif tinggi di Indonesia. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang pesat. Perkembangan kawasan perkotaannya bahkan sudah melebar hingga melampaui batas administratif kota. Pertumbuhan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk, yang tercatat sekitar 1.708.833 juta jiwa pada tahun 2024 (BPS Kota Semarang, 2024). Bertambahnya jumlah penduduk ini mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas di bidang jasa, industri, perdagangan, hingga bisnis di Kota Semarang. Aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat yang semakin padat tersebut secara otomatis menghasilkan limbah dalam jumlah yang semakin besar pula (Abdillah et al., 2013). Dengan kondisi tersebut, pengelolaan sampah menjadi tantangan

penting yang harus ditangani oleh pemerintah kota agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 1. 3 Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah (ton)
2020	4.236.201
2021	430.749
2022	431.085
2023	431.534
2024	434.243

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Kota Semarang menghasilkan volume sampah yang sangat tinggi setiap harinya. Walikota Semarang menyampaikan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya tidaklah kecil, bahkan bisa mencapai 800 sampai 1.200 ton. Jumlah tersebut juga bersifat fluktuatif dan hingga kini pengurangannya masih belum maksimal, sehingga sebagian besar tetap berakhir di TPA Jatibarang (Diskominfo Jateng, 2025). Angka ini menempatkan Kota Semarang sebagai penghasil sampah terbesar di Jawa Tengah, jauh melampaui kota-kota satelit di sekitarnya seperti Surakarta atau Magelang, sehingga efektivitas pengelolaan sampah di kota ini menjadi barometer bagi keberhasilan sanitasi di tingkat provinsi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil, dan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Selama ini, sistem pengelolaan sampah di Kota

Semarang masih sangat bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang sebagai tujuan akhir pembuangan sampah (Muning Harjanti et al., 2020). Ketergantungan ini telah membawa TPA Jatibarang pada titik jenuh yang ekstrem, dimana akumulasi gas metana dari tumpukan sampah yang tidak terkelola sempat memicu insiden kebakaran besar di zona aktif yang mengancam keamanan lingkungan kota (Humas Pemkot Semarang, 2024). Artinya, sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat hanya dikumpulkan lalu dibuang ke TPA, tanpa proses pengolahan atau pemilahan yang memadai sejak dari sumbernya. Ketergantungan yang besar pada TPA ini menimbulkan berbagai persoalan baru.

Kapasitas TPA Jatibarang yang terbatas kini semakin kewalahan menampung timbunan sampah yang masuk setiap hari. Kondisi tersebut memicu berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Dari segi lingkungan, tumpukan sampah yang semakin menumpuk dapat menyebabkan pencemaran tanah akibat cairan lindi yang merembes, pencemaran air permukaan maupun air tanah. Serta pencemaran udara karena bau menyengat dan gas metana yang dihasilkan oleh proses pembusukan. Selain itu, sebagai kota pesisir, kegagalan pengelolaan sampah di daratan Semarang sering kali menyebabkan kebocoran limbah ke saluran drainase yang memperparah penyumbatan dan risiko banjir rob di beberapa wilayah Kota Semarang (Muning Harjani et al., 2020). Dari segi kesehatan, masyarakat yang tinggal di sekitar TPA rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas lingkungan yang menurun.

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang masih jauh dari kata optimal, dan apabila tidak segera dilakukan perbaikan serta inovasi, maka persoalan sampah akan terus menjadi masalah besar yang mengganggu pembangunan kota serta kualitas hidup masyarakatnya (Wulandari, 2024).

Sebagai respons untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Semarang meluncurkan sebuah inovasi kebijakan melalui Program Pilah Sampah. Walikota Semarang telah mengeluarkan instruksi terkait pelaksanaan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah melalui surat edaran nomor B/576/600.4.15/III/2025. Dalam program ini, masyarakat didorong untuk memilah sampah sejak awal ke dalam dua kategori besar, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian, sampah organik akan diproses menjadi kompos dan sampah anorganik daur ulang akan disalurkan ke Bank Sampah atau TPS3R terdekat. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dianggap langkah krusial, karena dapat memudahkan proses pengolahan selanjutnya sekaligus mengurangi beban sampah yang langsung masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang (www.bululor.semarangkota.go.id).

Tujuan utama dari Program Pilah Sampah di Kota Semarang ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah ke TPA Jatibarang. Melalui pemilahan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk yang bermanfaat bagi pertanian dan penghijauan, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam bisa didaur ulang sehingga memiliki nilai

ekonomi (Rasyid & Hasibuan, 2023). Dengan begitu, volume sampah yang benar-benar berakhir di TPA dapat berkurang secara signifikan. Selain mengurangi beban TPA, program ini juga membuka peluang terciptanya ekonomi sirkular di masyarakat, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan juga sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali.

Keberhasilan program pilah sampah di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek kunci yang saling berkaitan. Pertama, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program oleh pemerintah menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana program ini dapat berjalan dengan efektif (Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2024). Tanpa adanya sistem pelaksanaan yang jelas dan pengawasan yang konsisten, maka program akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, pemilahan di tingkat rumah tangga, hingga pengangkutan dan pengolahan, berjalan sesuai rencana serta diawasi dengan baik agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat memegang peran sentral dalam keberhasilan program pilah sampah. Sebagaimana pun kebijakan yang dirancang pemerintah, tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai penghasil sampah utama. Kesadaran, kemauan, dan konsistensi warga dalam memilah sampah menjadi tolak ukur penting bagi keberhasilan program. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan secara luas dan berkesinambungan dan upaya pemberdayaan

masyarakat perlu terus dilakukan agar kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam keseluruhan aspek tersebut, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisien merupakan fondasi yang akan mengoptimalkan keberjalanan program. Apabila prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara konsisten, maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk memastikan program pilah sampah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi timbulan sampah di Kota Semarang.

Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah isu pengelolaan sampah di Kota Semarang, meskipun kajiannya masih berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti pengelolaan bank sampah dan proses digitalisasi sistem persampahan. Salah satu penelitian mengenai implementasi program “Semarang Bersih” menunjukkan bahwa keberadaan lebih dari 150 unit bank sampah berkontribusi secara signifikan terhadap penerapan kebijakan *zero waste*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa bank sampah memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat secara merata serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Penelitian lain mengkaji efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pengelolaan bank sampah. Temuan penelitian menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap pengurangan timbulan sampah dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya sistem tata kelola yang perlu diperkuat agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kemudian, terdapat penelitian lain yang membahas penerapan digitalisasi dalam sistem pengelolaan bank sampah di kecamatan Semarang Barat. Penelitian tersebut menekankan pemanfaatan aplikasi digital untuk mempermudah proses pencatatan transaksi, pengelolaan data, serta promosi hasil daur ulang. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasinya masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum secara komprehensif mencakup aspek tata kelola maupun tingkat partisipasi masyarakat.

Selain itu, ada juga penelitian lain yang mengkaji peran kepemimpinan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kampung Rewin (Sidoarjo), Kampung Tin (Malang), dan Pusat Daur Ulang Jambangan (Surabaya) sebagai upaya untuk mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan

kepemimpinan lokal berperan penting dalam keberhasilan program bank sampah, kompos rumah tangga, serta penerapan teknik biopori yang mampu menekan volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan ekonomi warga. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan keterbatasan dukungan pemerintah, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun pengawasan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola agar pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Terdapat juga penelitian lain yang mengkaji tata kelola pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kota Padang dengan fokus pada peran tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan program bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan kepedulian lingkungan, di mana masyarakat mulai memandang sampah sebagai sumber ekonomi melalui kegiatan pengumpulan dan penukaran di bank sampah. Meskipun, program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya dukungan pemerintah daerah, keterbatasan regulasi dan pendanaan, serta rendahnya minat sebagian masyarakat untuk terlibat aktif, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi antaraktor dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar tata kelola bank sampah di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang maupun di daerah lain umumnya masih berfokus pada pendekatan berbasis bank sampah dan belum secara mendalam membahas mengenai tata kelola sampah yang melibatkan masyarakat di Kota Semarang, khususnya dalam program pilah sampah. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada tata kelola pemerintahan dalam program pilah sampah di Kota Semarang, dengan menganalisa bagaimana prinsip-prinsip tata kelola diterapkan dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan mengkaji secara mendalam sejauh mana peran dan interaksi antaraktor, baik pemerintah, pelaksana program, maupun masyarakat, memengaruhi keberhasilan program.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian yang ada dengan memahami secara mendalam bagaimana program Pilah Sampah dijalankan di lapangan. Meskipun kebijakan dan instruksi telah diterbitkan oleh pemerintah, implementasi di tingkat pelaksanaan sering kali menghadapi berbagai kendala yang tidak terdapat dalam dokumen resmi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program, mulai dari mekanisme pemilahan di masyarakat, efektivitas sosialisasi, hingga bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah. Melalui pemahaman terhadap kondisi empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program Pilah Sampah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi kondisi, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan dalam sistem pengawasan, strategi peningkatan partisipasi masyarakat, maupun penyempurnaan regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks implementasi Program Pilah Sampah di Kota Semarang. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, efektif, dan mampu menjawab tantangan lingkungan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, maka di rumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan tata kelola Program Pilah Sampah di Kota Semarang sebagai upaya pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan dalam program pilah sampah, dengan fokus pada prinsip-prinsip *good governance*. Fokusnya adalah pada bagaimana program dijalankan, mulai dari sosialisasi kepada

masyarakat, proses pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga, hingga cara pengangkutan dan pengolahan dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apakah program tersebut benar-benar berhasil mengurangi timbulan sampah yang selama ini menumpuk di TPA Jatibarang.

- b) Mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Penelitian ini akan menggali bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, baik dalam konteks kesadaran lingkungan, kepatuhan terhadap kebijakan pemilahan sampah, maupun peran mereka dalam mendukung kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Melalui kajian terhadap Program Pilah Sampah di Kota Semarang, penelitian ini dapat menambah literatur mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat daerah. Selain itu,

penelitian ini juga berkontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk, dikelola, serta berpengaruh terhadap efekti. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa di daerah lain, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan maupun pengembangan teori.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Kota Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Pilah Sampah. Pemerintah dapat melihat apa saja yang masih menjadi kendala, serta bagaimana strategi yang bisa dilakukan agar program ini lebih efektif. Dengan adanya masukan ini, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi timbulan sampah di TPA Jatibarang.

2) Bagi Pengelola Program Pilah Sampah

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pengelola program, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun perangkat di tingkat kelurahan. Temuan penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata lapangan, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kendala teknis, maupun kurangnya sarana dan prasarana. Dengan demikian, pengelola program dapat meningkatkan sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta

menyediakan fasilitas pendukung yang lebih baik agar masyarakat lebih mudah dalam memilah sampah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat isu serupa. Misalnya, untuk membandingkan pelaksanaan program pilah sampah di Kota Semarang dengan daerah lain, atau melihat lebih dalam dari aspek tertentu seperti efektivitas sanksi, tingkat kesadaran masyarakat, maupun inovasi pengelolaan sampah lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan dan sampah.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Tata Kelola Pemerintahan

Secara umum, tata kelola dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dalam suatu proses organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Menurut (Damanik et al., 2024), tata kelola pemerintahan mencakup seperangkat prinsip dan mekanisme yang menjamin agar proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi kepentingan publik.

Istilah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik muncul dari konsep dasar tersebut. Menurut Bank Dunia, *good governance* diartikan sebagai suatu cara pemanfaatan kekuasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan keuangan publik guna mendukung pembangunan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, konsep ini menekankan pada bagaimana negara menjalankan aktivitasnya terhadap aspek input, output, serta dampak yang dihasilkan. Dampak tersebut dapat berupa pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Sementara, menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan praktik penggunaan kewenangan dalam pengelolaan urusan administrasi publik, yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan administrasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat tiga pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yakni kesejahteraan sosial, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan. (Maranjaya, 2022).

Menurut hasil kajian yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara, Simangunsong dan Sinuraya (2004: 256-263) menyebutkan bahwa terdapat sembilan elemen dasar yang berperan penting dalam mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi

Prinsip partisipasi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah, mulai

dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.

2. Transparansi

Transparansi menekankan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memantau, memahami, serta menilai proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas akan menunjukkan tingkat tanggung jawab lembaga publik dan aparat pemerintah atas tindakan serta keputusan yang diambil.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan atau program dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

5. Responsif

Responsivitas dapat dinilai melalui kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat.

6. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan atau keadilan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan publik tanpa adanya diskriminasi.

7. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan penerapan peraturan yang konsisten, adil, dan tegas agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif.

8. Orientasi Konsensus

Orientasi consensus mengedepankan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berupaya menemukan kesepakatan di antara kepentingan yang beragam.

9. Visi Strategis

Prinsip visi strategis mendorong pentingnya arah kebijakan yang berpandangan jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam penelitian ini, teori *good governance* digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan program pilah sampah di Kota Semarang. Fokus penelitian terdapat pada bagaimana partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Teori ini tidak hanya menilai efektivitas pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Penelitian ini menyoroti bagaimana tata kelola yang baik dapat membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat di setiap tahapan program,

mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mampu membangun sistem yang mendorong partisipasi warga dalam kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya. Partisipasi masyarakat dipandang bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan pilar utama dalam menjamin keberlanjutan program. Keterlibatan warga, baik dalam kegiatan sosialisasi, pengelolaan sampah rumah tangga, maupun dalam aktivitas Bank Sampah dan TPS3R, menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, dalam penelitian ini, konsep *good governance* tidak digunakan secara keseluruhan, melainkan pada sejumlah indikator yang relevan dengan karakteristik objek penelitian. Indikator yang digunakan terbatas pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta partisipasi masyarakat sebagai instrumen analisis utama. Penentuan indikator ini didasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan faktor determinan dalam pencapaian kinerja organisasi publik. Menurut Sedarmayanti (2012) dalam bukunya *Good Governance (Tata Kerja dan Pola Kerja yang Baik)*, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien. Fokus pada keempat indikator tersebut dipilih karena mampu memotret sejauh mana mekanisme kerja antara pemerintah dan masyarakat dapat bersingeri secara optimal demi mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Transparansi digunakan untuk melihat sejauh mana

keterbukaan informasi mengenai proses dan mekanisme pemilahan sampah. Akuntabilitas menilai tanggung jawab aparat dalam pengawasan serta pelaksanaan kegiatan. Dimana kedua hal ini merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) agar masyarakat bersedia berpartisipasi secara berkelanjutan (Rasyid & Hasibuan, 2023). Sedangkan efektivitas dan efisiensi digunakan untuk mengukur optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sarana pendukung. Reduksi indikator dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* guna menjaga kedalaman analisis terhadap interaksi operasional di lapangan. Teori *good governance* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang.

1.5.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam perspektif politik dan pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan teknokratis linear menuju pendekatan tata kelola yang terintegrasi. Untuk mengkaji program pilah sampah di Kota Semarang, penelitian ini juga mengadopsi teori *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM) yang dikemukakan oleh Anschütz, IJgosse, dan Scheinberg (2004) sebagai antitesis terhadap model pengelolaan sampah konvensional yang cenderung parsial dan hanya berfokus pada aspek hilir atau pembuangan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). ISWM mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai suatu kerangka kerja yang

menyelaraskan berbagai elemen sistem dengan kondisi sosial-politik lokal guna mencapai keberlanjutan. Menurut Anschütz, dkk. (2004), inti dari teori ini adalah pemahaman bahwa manajemen sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan penyediaan infrastruktur, melainkan harus menyeimbangkan tiga dimensi utama: pemangku kepentingan (*stakeholders*), elemen sistem teknis (*waste system elements*), dan aspek keberlanjutan strategis (*sustainability aspects*). Penggunaan teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat Program Pilah Sampah bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan daerah yang saling berkelindan.

Dimensi pertama dalam teori *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM) adalah Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*). Dimensi ini menekankan bahwa setiap aktor yang memiliki kepentingan dalam siklus sampah harus memiliki peran yang jelas dalam skema tata kelola. Dalam perspektif ISWM, aktor tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga mencakup sektor swasta, komunitas masyarakat, hingga sektor informal. Scheinberg (2010) menegaskan dalam studinya bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor informal dan pengguna layanan, dilibatkan dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan. Penerapan dimensi *stakeholders* dalam penelitian ini sangat krusial untuk membedah relasi koordinasi regulator pusat di tingkat daerah dengan pemerintah di tingkat bawah hingga organisasi kemasyarakatan yang ada.

Dimensi kedua adalah Elemen Sistem (*Waste System Elements*). Dimensi ini merujuk pada aspek operasional teknis yang mencakup seluruh tahapan alur sampah dari hulu ke hilir. Tahapan tersebut meliputi timbulan sampah (*waste generation*), pemilahan di sumber (*source segregation*), pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Dalam kerangka ISWM, efektivitas tata kelola diukur dari sejauh mana alur teknis ini berjalan secara sinkron. Jika data menunjukkan adanya penumpukan residu di TPA Jatibarang, hal itu menandakan adanya kegagalan pada elemen sistem di bagian hulu yang tidak terintegrasi dengan sistem pengangkutan. Dimensi ketiga adalah Aspek Keberlanjutan (*Sustainability Aspects*). Dimensi ini merupakan faktor-faktor strategis yang menentukan daya tahan sebuah program dalam jangka panjang, mencakup aspek finansial, legal, institusional, dan sosial. (Scheinberg et al., 2010) memandang bahwa sebuah program yang memiliki teknologi tinggi namun tidak didukung oleh regulasi yang tegas atau penerimaan budaya dari warga dipastikan akan mengalami kegagalan sistemik. Kurangnya instrumen hukum yang kuat seringkali menjadi penghambat utama keberlanjutan program di tingkat lokal

Dalam perspektif birokrasi, aspek institusional dalam *Integrtated System Waste Management* (IWSM) menyoroti kapasitas organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol dan fasilitasi. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa manajemen sampah yang terintegrasi membutuhkan transisi dari pendekatan terpusat menuju pendekatan tata kelola partisipatif. Hal tersebut juga mengonfirmasi bahwa tanpa kapasitas institusi yang kuat di

tingkat kelurahan, program pengurangan sampah hanya akan menjadi beban operasional bagi pemerintah tanpa hasil yang signifikan (Maulana et al., 2025).

Lebih lanjut, teori *Integrated System Waste Management* (ISWM) dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk mempertajam prinsip *Good Governance* yang digunakan. Jika indikator transparansi dalam *Good Governance* seringkali hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi publik, maka dalam kerangka ISWM, transparansi tersebut diarahkan secara spesifik pada keterbukaan data arus sampah, pencapaian target reduksi, dan aliran biaya operasional kepada seluruh pemangku kepentingan guna membangun kepercayaan publik (*public trust*).

Begitu pula dengan indikator partisipasi, yang dalam ISWM diukur secara rigid melalui keterlibatan aktif subjek dalam pemilahan sampah di sumbernya. Partisipasi tidak lagi dipandang sebagai kehadiran pasif dalam forum-forum pertemuan, melainkan keterlibatan substantif dalam unit-unit pengolahan sampah berbasis komunitas. Melalui lensa ISWM, partisipasi masyarakat dipandang sebagai fondasi yang mendukung keberlanjutan sistem secara keseluruhan. Penguatan peran komunitas merupakan syarat mutlak bagi terciptanya sistem manajemen sampah yang mandiri. Secara teoretis, akuntabilitas dalam ISWM berkaitan erat dengan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab di setiap level organisasi. Setiap elemen dalam sistem harus mampu mempertanggungjawabkan fungsinya, mulai dari tingkat rumah tangga hingga otoritas pemrosesan akhir. Kejelasan fungsi institusional

merupakan prasyarat agar sistem pengelolaan sampah tidak mengalami tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik di sektor lingkungan (Zein et al., 2024).

Sebagai kesimpulan teoretis, teori ISWM memandang bahwa kegagalan sebuah kebijakan lingkungan seringkali berakar pada ketimpangan salah satu dimensi, baik itu dimensi pemangku kepentingan, elemen sistem, maupun aspek keberlanjutan. Dengan menggunakan kerangka kerja ISWM, analisis dapat difokuskan pada identifikasi hambatan yang muncul dari lemahnya integrasi antar-dimensi tersebut. Teori ini menyediakan instrumen bagi penelitian untuk mengevaluasi apakah sebuah sistem tata kelola lingkungan telah berjalan secara komprehensif atau masih terjebak pada pendekatan yang bersifat parsial.

1.6 Definisi Operasional

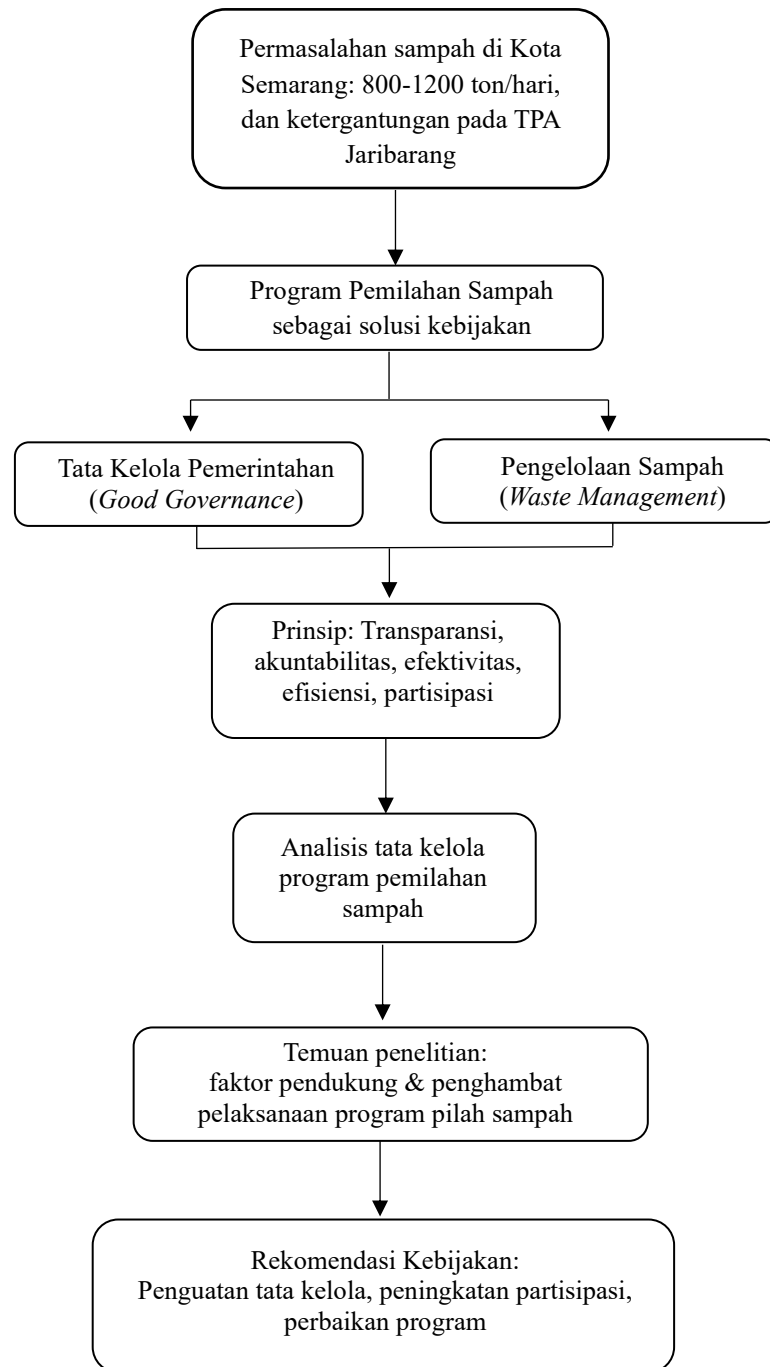
Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
Tata Kelola Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	Transparansi	a) Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tujuan, mekanisme, jadwal pengumpulan, dan hasil program pilah sampah.

Konsep	Variabel	Indikator
		<p>b) Adanya keterbukaan data timbulan sampah dan laporan hasil kegiatan kepada masyarakat di tingkat kelurahan.</p> <p>c) Tersedianya kanal komunikasi dua arah yang memfasilitasi masyarakat untuk bertanya dan memberikan masukan.</p>
	Akuntabilitas	<p>a) DLH dan pengelola program di tingkat kelurahan menyusun laporan kegiatan serta menindaklanjuti keluhan masyarakat.</p> <p>b) Adanya mekanisme pelaporan berkala tentang capaian pengurangan sampah.</p> <p>c) Pemerintah menyediakan forum evaluasi bersama masyarakat untuk membahas capaian dan kendala pelaksanaan.</p>
	Partisipasi	<p>a) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi program.</p> <p>b) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program pilah sampah.</p> <p>c) Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan program.</p>

Konsep	Variabel	Indikator
	Efektivitas dan Efisiensi	a) Program pilah sampah berkontribusi nyata dalam menurunkan volume sampah ke TPA Jatibarang. b) Pemanfaatan sarana dan sumber daya berjalan optimal. c) Meningkatnya jumlah warga yang memilah sampah secara mandiri dan konsisten.
Keberhasilan Progam Pilah Sampah	Hasil	Penurunan volume sampah ke TPA Jatibarang, peningkatan pemilahan & daur ulang, meningkatnya kesadaran masyarakat.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan tertentu. Metode ini mencakup proses yang sistematis, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis yang dilakukan secara ilmiah sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan (Sari, 2022).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tata kelola program pemilahan sampah di Kota Semarang. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan dengan beragam metode yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap subjek yang diteliti. Metode ini menggunakan pendekatan alamiah sesuai dengan konteks lingkungan penelitian, dengan tujuan untuk memahami serta menafsirkan suatu fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat (Pola Anto et al., 2024). Metode kualitatif dipilih karena dapat menggali fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan interaksi antaraktor, proses kebijakan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang detail mengenai bagaimana tata kelola program pilah sampah di Kota Semarang, hambatan yang muncul di lapangan, serta strategi yang digunakan pemerintah maupun pelaksana program.

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah, yaitu Kota Semarang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam proses implementasi program pemilahan sampah dalam konteks nyata di lapangan. Studi kasus juga memungkinkan peneliti menelaah berbagai aspek tata kelola, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, pendekatan ini menekankan peran para pemangku kepentingan seperti dinas terkait, pelaksana lapangan, dan masyarakat, serta bagaimana interaksi antar pihak tersebut berpengaruh pada keberhasilan program. Keunggulan lain dari studi kasus adalah fleksibilitasnya dalam menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang dapat memberikan gambaran lebih utuh dan valid.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tata kelola pada program pemilahan sampah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi di lapangan, tetapi juga berusaha memberikan makna, persepsi, serta dinamika sosial yang memengaruhi jalannya program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Semarang.

1.8.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, yang dipilih karena merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menghadapi tantangan

serius dalam pengelolaan sampah perkotaan. Kota Semarang menjadi menarik untuk diteliti karena telah menginisiasi program pilah sampah sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Program ini juga sejalan dengan kebijakan daerah dalam memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Waktu pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan periode berjalannya program pilah sampah di Kota Semarang pada tahun 2025, yakni sejak diterbitkannya Surat Edaran oleh Walikota Semarang Nomor: B/576/600.4.15/III/2025 tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada kondisi pelaksanaan program pada tahun tersebut, meliputi tahapan pelaksanaan di lapangan, peran pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemilahan sampah organik dan anorganik.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam program pilah sampah di Kota Semarang, baik dari pemerintah, pelaksana teknis, maupun masyarakat. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Adapun subjek yang akan diwawancarai, meliputi:

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;

2. Lurah Kelurahan Brumbungan, Rejosari, Krobokan, Panggung Lor, Pedalangan;
3. Masyarakat (4 orang);
4. WALHI Jawa Tengah.

Untuk mendapatkan data yang representatif serta mencerminkan kondisi sosial yang beragam, lokasi wawancara ditentukan berdasarkan pembagian wilayah administratif Kota Semarang, yang terbagi menjadi lima wilayah besar, yaitu Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Semarang Selatan.

Dari masing-masing wilayah besar tersebut, akan dipilih satu kecamatan dan satu kelurahan yang dianggap representatif secara geografis dan sosial-ekonomi. Pemilihan ini didasarkan pada karakteristik umum wilayah, seperti kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi. Tabel berikut ini menggambarkan rancangan pemetaan lokasi dan subjek wawancara:

Tabel 1. 5 Pemetaan Lokasi dan Subjek Penelitian Program Pilah Sampah di Kota Semarang

Wilayah Kota Semarang	Kecamatan (Perwakilan)	Kelurahan (Perwakilan)	Keterangan
Semarang Utara	Semarang Utara	Panggung Lor	Wilayah pesisir dengan kepadatan tinggi
Semarang Timur	Semarang Timur	Rejosari	Wilayah perdagangan dan padat penduduk
Semarang Tengah	Semarang Tengah	Brumbungan	Wilayah pusat kota, administratif
Semarang Barat	Semarang Barat	Krobokan	Wilayah industri dan perumahan padat

Wilayah Kota Semarang	Kecamatan (Perwakilan)	Kelurahan (Perwakilan)	Keterangan
Semarang Selatan	Banyumanik	Pedalangan	Wilayah pendidikan dan partisipatif tinggi

Catatan: Penentuan kelurahan pada tabel di atas bersifat konseptual sebagai representasi karakter wilayah di Kota Semarang. Pemilihan kelurahan didasarkan pada pembagian wilayah Kota Semarang yang terdiri atas Semarang Tengah, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan penelitian (Sulung & Muspawi, 2024).

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang terdiri dari pejabat pemerintah pengelola program, petugas lapangan, dan warga yang aktif memilah sampah. Data primer ini juga didukung oleh observasi langsung terhadap pelaksanaan program pemilahan sampah di lokasi penelitian. Data primer sangat penting untuk mendapatkan informasi yang aktual, mendalam, dan kontekstual mengenai proses, kendala dan dinamika pelaksanaan program.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang tersedia, seperti dokumen, literatur, ataupun data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Sulung & Muspawi, 2024).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan daerah, data statistik, serta publikasi terkait program pemilahan sampah di Kota Semarang. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding untuk memperkuat analisis serta memberikan gambaran latar belakang dan konteks yang lebih luas mengenai program yang diteliti.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk memperoleh data yang lengkap dan valid, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020: 304), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam Melalui wawancara, akan diperoleh data yang berguna dalam menggali pandangan, pendapat, dan persepsi dari subjek penelitian mengenai tata kelola pemerintahan dari implementasi program pemilahan sampah di Kota Semarang. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau platform digital seperti *zoom* tergantung dengan kondisi informan. Wawancara akan direkam dengan izin dari informan.

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, meliputi pejabat pemerintah, petugas lapangan, dan warga yang aktif dalam program pemilahan sampah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara detail mengenai proses pelaksanaan, kendala, serta persepsi para pelaku terkait program pemilahan sampah.

b. Dokumentasi

Cara lain untuk mendapatkan data yaitu dengan menggunakan dokumentasi. Menurut Hasan, I (2002), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dan ditujukan kepada seorang peneliti, namun diberikan dalam bentuk dokumen. Data dokumentasi dapat diperoleh melalui berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan, dan data statistik yang berkaitan dengan program pemilahan sampah di Kota Semarang. Dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data

pendukung yang memberikan gambaran kontekstual terhadap penelitian.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengolah dan memahami data dengan cara menata, mengelompokkan ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, lalu menghubungkannya kembali untuk menemukan pola. Melalui tahapan ini, peneliti berusaha mengidentifikasi hal-hal yang penting, menarik makna dari data yang diperoleh, serta menentukan informasi apa saja yang relevan untuk disampaikan kepada orang lain (Nurrisa & Hermina, 2025).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yang membagi teknik analisis data ke dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Reduksi data (*reduction*)

Informasi yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan teliti dan menyeluruh. Banyaknya data yang diperoleh akan menjadikannya lebih kompleks dan sulit untuk dikelola. Oleh sebab itu, diperlukan proses reduksi data. Reduksi data berarti menyaring dan merangkum data, menyoroti hal-hal yang penting, mencari pola atau tema yang muncul, serta membuang informasi yang tidak relevan (Nurrisa & Hermina, 2025). Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasi data dengan maksimal sehingga memperoleh kesimpulan akhir. Tujuan dari reduksi data yaitu untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data, dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam proses reduksi data ini, segala hal diluar pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan dalam program pemilahan sampah di Kota Semarang harus dihilangkan agar pembahasan tetap sesuai dengan rumusan yang dibuat.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian yang paling sering digunakan adalah teks naratif. Penyajian data ini bertujuan agar situasi lebih mudah dipahami serta memudahkan peneliti dalam menentukan langkah analisis berikutnya berdasarkan temuan yang ada. Hasil wawancara dapat ditampilkan dalam bentuk narasi atau kutipan langsung yang menggambarkan pandangan informan mengenai tata kelola program tertentu. Sementara itu, informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, maupun dokumen relevan lainnya dapat disajikan dalam bentuk tabel atau ringkasan. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah melihat kesesuaian maupun perbedaan antara perencanaan program dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Menarik Kesimpulan (*concluding drawing*)

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan serta verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat biasanya masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut terbukti konsisten dan didukung oleh data yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Hasil penelitian pada tahap ini dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas, tetapi menjadi lebih terang setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Kesimpulan tersebut bisa berupa hubungan sebab-akibat, interaksi antar aktor, asumsi, maupun kerangka teori yang terbentuk dari data yang telah dianalisis.

1.8.7 Kualitas Data

Data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting sehingga peneliti tidak boleh mengabaikan kualitasnya. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan benar dan dapat dipercaya terkait dengan masalah yang diteliti, maka diperlukan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keaslian data. Triangulasi data adalah salah satu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Menurut penjelasan dari *Institute of Global Technology*, metode ini bertujuan untuk menilai data secara cepat sehingga dapat memperkuat interpretasi serta memperbaiki

kebijakan dan program berdasarkan bukti yang tersedia. Dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan melalui beragam teknik, oleh berbagai pihak, dan pada kelompok masyarakat yang berbeda, hasil penelitian akan saling mengkonfirmasi. Hal ini membantu meminimalkan potensi bias yang mungkin muncul apabila data hanya bersumber dari satu penelitian saja (Susanto et al., 2023).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik triangulasi data untuk memadukan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Triangulasi data juga membantu penulis untuk memperkuat validitas temuan penelitian dengan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai tata kelola implementasi program pemilahan sampah di Kota Semarang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.